



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

Nomor : **45.45/PUU/PAN.MK/SP/04/2022**

04 April 2022

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 45/PUU-XX/2022

Yth. **Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Jum`at tanggal 01 April 2022 pukul 09:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

45/PUU-XX/2022

diajukan oleh:

Robert Mandala Yasin untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Yang memberikan kuasa kepada **Ricky K. Margono, S.H., M.H., dkk.**

perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Frasa “alat-alat lain” dan “patut diduga” dalam rangkaian ketentuan “alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan” pada Pasal 37 ayat (5) Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Ciptaker Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan (Lembaran Negara. Republik Indonesia. No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Alat-alat yang terbukti berdasarkan bukti permulaan yang cukup yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan”;
3. Memerintahkan untuk memuat amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan PEMOHON untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia;

atau,

Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan Mahkamah Agung

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Panitera,
Muhidin, S.H., M.Hum.**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 45.45/PUU/PAN.MK/BASP/04/2022**

Pada hari ini, Senin tanggal 04 April 2022 pukul 07:59 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 45/PUU-XX/2022 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

